

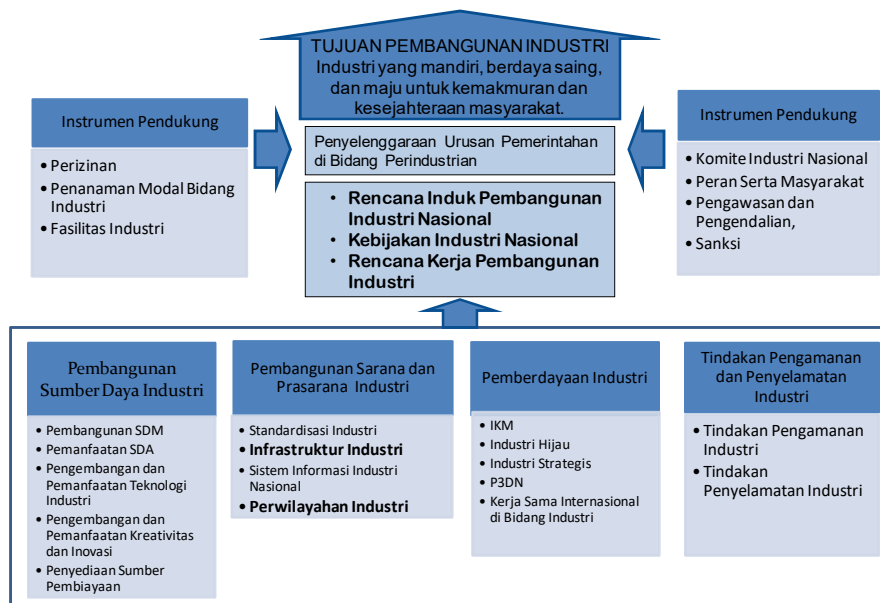
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian, pada pasal 11 disebutkan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Rencana itu selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kab/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur.

Secara umum skema UU No.3 tahun 2014 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Sumber: Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri, 2014

Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota disusun paling sedikit memperhatikan:

- Potensi sumber daya Industri daerah:
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota;
- Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

RPIK merupakan prioritas dari Walikota/Bupati di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kabupaten/kota terkait melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD. Rancangan RPIK/K disusun oleh Bupati/Walikota, sedangkan rancangan Renstra-SKPD disusun oleh pimpinan masing-masing SKPD Kabupaten/kota. Rancangan RPIK/K ditelaah oleh Gubernur untuk melihat konsistensi RPIK/K dengan RPIP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk menelaah konsistensi RPIK/K dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pengembangan Pewilayahan Industri Kementerian Perindustrian memberikan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Industri untuk daerah-daerah di Kalimantan, termasuk didalamnya Provinsi Kalimantan Selatan. Penerima manfaat kegiatan ini adalah *stakeholder* di provinsi di Wilayah Kalimantan Selatan antara lain Pemerintah Daerah, pelaku industri, dan juga masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terstruktur dan terarah. Penerima manfaat tersebut akan dapat tercakup secara keseluruhan ketika Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan terwujud dan diimplementasikan.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016-2035 mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 serta Kebijakan Industri Nasional dalam rangka

mewujudkan visi pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Daerah pada Tahun 2035 dan visi nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”.

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016-2035 sebagai suatu rencana strategis untuk menempatkan perindustrian yang tangguh sebagai *core business* suatu daerah diharapkan dapat menata pemanfaatan sentra industri yang terencana dengan baik, lebih terarah dan lebih optimal akan menciptakan sistem perindustrian yang lebih produktif, aman dan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum Kajian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 9 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan industri nasional tahun 2015-2035
3. UU No. 3 Tahun 2014 Pasal 10 tentang rencana induk pembangunan industri daerah
4. UU No. 3 Tahun 2014 Pasal 11 tentang rencana pembangunan industri kabupaten.

1.3. Fokus Permasalahan Penelitian

Dari sekilas uraian gambaran diatas disertai dengan acuan dasar beberapa peraturan Perundang-undangan, yang pada intinya kajian penelitian ini difokuskan khusus untuk memberikan potret tentang Kegiatan Pengembangan ekonomi dalam hal ini industri kecil Masyarakat khususnya Pengembangan UMKM masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai Penentu kebijakan di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini sering disebut juga sebagai metode yang naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasilnya penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Arikunto, 2006:134). Penelitian ini menginginkan pemaknaan yang sangat mendalam, dalam penelitian ini aspek utama yang diamati adalah mengenai proses mereka dalam menjalani hidup sehari-hari.

Peneliti memilih informan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dimana peneliti sudah menentukan informan yang mengetahui masalah tersebut. Kriteria informan antara lain mereka yang dianggap mampu mempresentasikan kehidupan masyarakat pesisir. Dalam pemilihan informan ini menurut Spradley (1997) ada lima persyaratan untuk memilih informan yang baik yaitu sebagai berikut : mereka yang menguasai atau memahami tentang Pelaku pengembangan Industri Kecil Menengah masyarakat. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang diteliti. Kedua, mereka mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada 2°1'37" sampai 2°35'58" Lintang Selatan dan antara 114°50'58" sampai 115°50'24" Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai mempunyai luas wilayah 892,70 km² atau merupakan 2,38% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 (sepuluh) kecamatan dengan 219 desa/kelurahan. Kecamatan Danau Panggang merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 224,49 km² atau 25,15% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 29,24 km² atau 3,28% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun luas masing-masing kecamatan adalah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

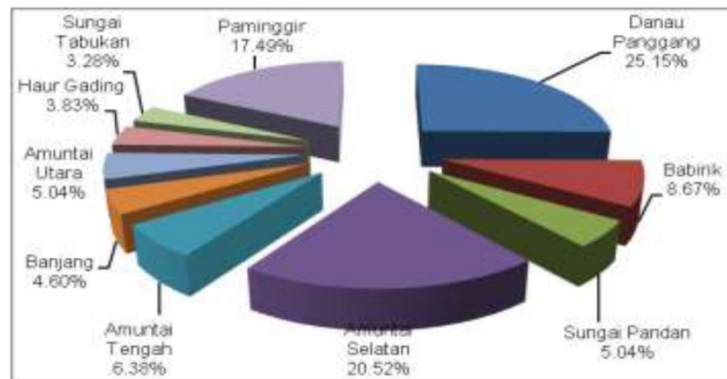
No	Kecamatan	Luas (Km ²)	%	Kelurahan	Desa
1	Danau Panggang	224,49	25,15	-	16
2	Babirik	77,44	8,67	-	23
3	Sungai Pandan	45,00	5,04	-	33
4	Amuntai Selatan	183,16	20,52	-	30

5	Amuntai Tengah	56,99	6,38	5	24
6	Banjang	41,10	4,60	-	20
7	Amuntai Utara	45,00	5,04	-	26
8	Haur Gading	34,15	3,83	-	18
9	Sungai Tabukan	29,24	3,28	-	17
10	Paminggir	156,13	17,49	-	7
Jumlah		892,70	100,00	5	214

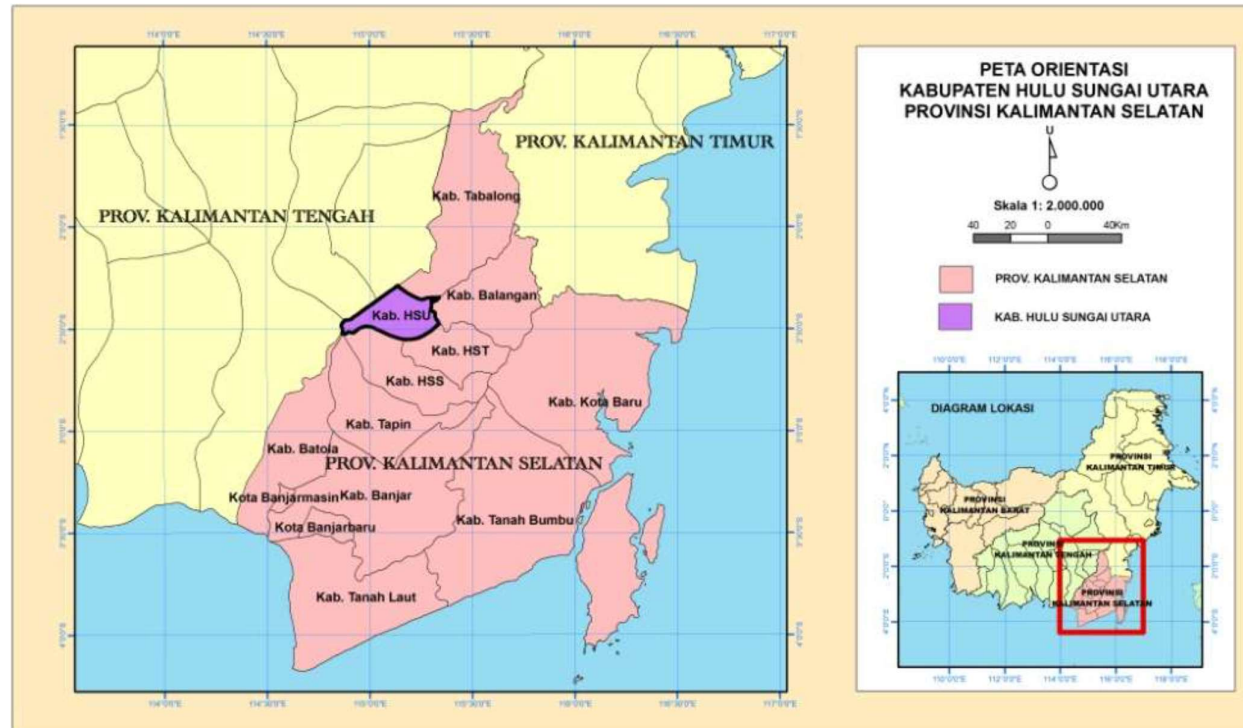
Sumber: BPS Kab HSU, 2016

Secara proporsional berdasarkan luasan wilayah kecamatan maka Kecamatan Danau Panggang merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar yang mencapai 25,15%. Kecamatan Sungai Tabukan sebagai daerah hasil pemekaran dari Kecamatan Sungai Pandan memiliki luasan terkecil dibanding kecamatan lainnya yakni sebesar 3,26%. Secara lengkap proporsi masing-masing kecamatan terhadap luasan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada gambar berikut :

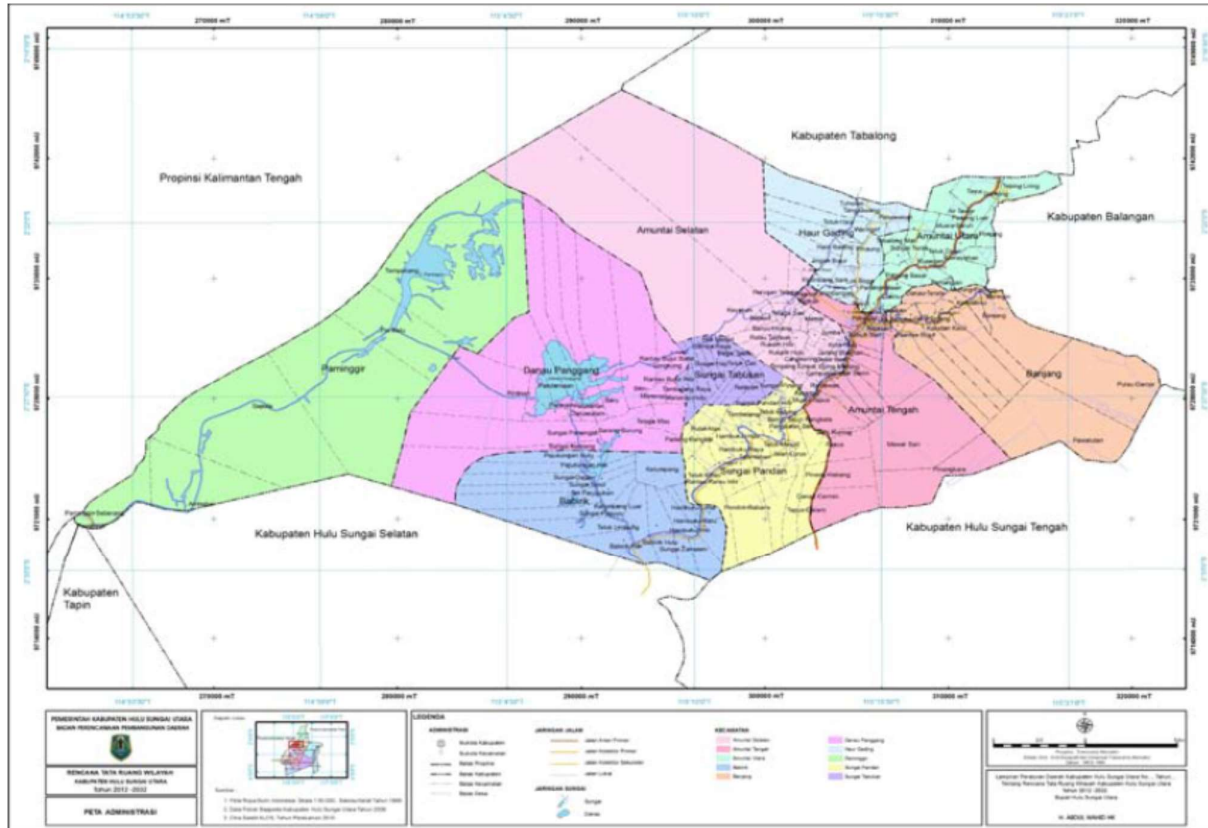
Gambar 2.1. Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara



Gambar 2.2. Peta Orientasi Kabupaten Hulu Sungai Utara



Gambar 3.3. Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara



Berdasarkan topografi wilayah, umumnya kemiringan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya ada satu kelas kelerengan, yakni kelas kelerengan antara 0-2% pada seluruh kecamatan yang ada, jadi dapat dikatakan bahwa dari kelas kelerengan yang ada, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai lahan yang landai dan nyaris tanpa gelombang pada seluruh wilayahnya.

Berdasarkan peta Geomorfologi Barito Basin dan pengujian lapang geomorfologi Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh kenampakan relatif uniform dari dataran banjir (flood plain) yang relatif masih muda dan terendam air pada periode waktu tertentu. Kenampakan ini dibentuk oleh aktifitas pergerakan air terutama aliran sungai.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dibedakan kedalam back swamp dan peat swamp. Sementara di sebagian kecil wilayah Hulu Sungai Utara dicirikan oleh bentuk lahan levee yang menempati sepanjang Sungai Nagara. Bentuk lahan back swamp sebagian besar menyebar di bagian selatan Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase relatif buruk yang dicirikan oleh banjir pada periode tertentu atau genangan air yang bersifat sementara sampai permanen. Pada wilayah ini umumnya ditumbuhi rumput swamp atau ditanami padi. Bentuk lahan peat swamp dimana pada tengahnya seringkali terbentuk kubah gambut (dome) menyebar di bagian utara dan bagian barat Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase dan didominasi oleh lahan gambut dengan kedalaman lebih besar dari 1 meter.

Berdasarkan peta Sistem Lahan RePPPProT secara regional Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar memiliki fisiografi wilayah berupa levee dan rawa belakang dengan beberapa sistem lahan antara lain Kahayan (KHY), Gambut (GBT), Klaru (KLR), Mendawai (MDW), Tanjung (TNJ), dan Lawangwang (LWW).

Berdasarkan kondisi hidrogeologi, jenis tanah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kompleks podsolik merah kuning dan latosol, podsolik merah kuning, alluvial dan organosol gleihumus. Dari keempat jenis tanah tersebut yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah jenis tanah alluvial dan organosol gleihumus. Kedua jenis tanah ini sangat subur juga tidak peka terhadap erosi. Sedangkan jenis kompleks podsolik merah kuning dan latosol mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat

dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat sekecil mungkin terjadi.

Adapun jenis tanah yang terbanyak di kabupaten ini adalah Alluvial, yaitu mencapai 56.179 Ha (62,93%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah kompleks podsolik merah kuning dan latosol, yaitu 605 Ha (0,68%). Jenis tanah alluvial dan organosol glei humus keberadaannya hampir disemua kecamatan dan mendominasi jenis tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu mencapai 97,98% dari luas wilayah. Jenis tanah alluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Danau Panggang dan paling sedikit di Kecamatan Banjarang. Jenis tanah Alluvial ini terdapat di semua kecamatan. Adapun jenis tanah organosol glei humus hanya terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Utara dan Danau Panggang dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Danau Panggang serta jumlah paling sedikit di Kecamatan Amuntai Utara.

Berdasarkan sistem DAS, sebagian besar Kabupaten Hulu Sungai Utara berada dalam wilayah Sub-Sub DAS Balangan, Sub-Sub DAS Batang Alai, Sub-Sub DAS Danau Panggang, dan Sub-Sub DAS Tabalong Kanan yang merupakan Sub-Sub DAS dari Sub DAS Negara dan DAS Barito Tengah. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2.

DAS, Sub DAS dan Sub-Sub DAS di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	DAS	Sub DAS	Sub-Sub DAS	Luas (Ha)
1	Barito	Negara	- Balangan - Batang Alai - Danau Panggang - Tabalong Kanan	12.341.777 9.779.672 40.284.582 2.048.492
2	Barito	Barito Tengah		26.181.633
Jumlah				90.636.156

Sumber: Peta Digital DAS Provinsi Kalimantan Selatan, BPDAS Barito Kemenhut

Beberapa sungai besar yang melintasi dan terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Sungai Balangan, Sungai Tabalong, dan Sungai Negara. Sungai Tabalong terletak pada 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong dengan luas daerah pengaliran 3.604 km² dengan panjang sungai 187 km. Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa,

Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Missin.

Sungai Tabalong merupakan anak Sungai Negara, bertemu dengan Sungai Balangan (yang juga anak Sungai Negara) tepat berada pada Kota Amuntai yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat ini kondisi kapasitas penampang Sungai Tabalong tidak mencukupi terutama pada saat musim penghujan sehingga pada ruas-ruas tertentu dari penampang sungai terjadi banjir yang menimbulkan genangan pada daerah pertanian, permukiman dan perkotaan terutama pada daerah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Amuntai Utara, Amuntai Selatan, Danau Panggang, Babirik, Banjang, Amuntai Tengah dan Sungai Pandan.

Fluktuasi debit Sungai Tabalong mempunyai perbedaan yang tinggi pada saat musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau debit sungai sangat kecil sedangkan pada musim penghujan debit sungai cukup tinggi sehingga kapasitas sungai yang ada tidak mencukupi, yang menyebabkan genangan dan banjir. Adapun karakteristik Sungai Tabalong adalah :

- 1) Sungai Negara bagian hulu dengan kapasitas debit ± 350 m³/detik merupakan pertemuan Sungai Balangan dan Tabalong yang masing-masing mempunyai kapasitas debit ± 250 m³/detik dan ± 300 m³/detik.
- 2) Bentuk DAS Sungai Tabalong memanjang dan DAS Sungai Balangan berbentuk kipas. Waktu konsentrasi (T_c) debit limpasan air hujan menuju titik outlet DAS Tabalong akan lebih lama dari DAS Balangan.
- 3) Kapasitas Sungai Negara akan penuh (full capacity) jika debit dari Sungai Balangan maksimum dan Sungai Tabalong normal atau sebaliknya Sungai Tabalong maksimum sedangkan Sungai Balangan normal.

Sungai Tabalong mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, dimana sungai secara fungsi morfologi sungai merupakan daerah aliran sungai yang mengalirkan air dari limpasan hujan dan debit inflow dari sungai lainnya juga dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana mandi cuci, permukiman, transportasi air, budidaya ikan keramba dan pemenuhan kebutuhan domestik dan non domestik lainnya.

Sungai lainnya adalah Sungai Pamintangan, dimana secara geografis sungai ini terletak pada 115° 17' BT dan 020 17' LS sampai 115° 26' LS dengan lokasi hulu

Sungai Pamintangan terletak pada Desa Telaga Itar Kabupaten Tabalong dan hilir sungai terletak di Desa Timbul Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sungai pamintangan berfungsi sebagai pembagi debit alamiah dari Sungai Tabalong yang menuju Kota Amuntai.

Sungai Pamintangan bermuara ke Danau Panggang yang merupakan areal retarding basin dari Sungai Antasan, Sungai Utar, Sungai Tapirandang dan Sungai Namang yang banyak mendapatkan inflow debit dari Sungai Negara di daerah Babirik pada saat musim hujan. Luas areal Danau Panggang sebesar 11,43 km² dengan luas areal rawa di sekitar Danau Panggang sebesar 57,02 km². Pada musim kemarau tinggi muka air di areal rawa 0,2 – 0,5 m dan Danau Panggang antara 0,5 m – 1,5 m.

Sungai Pamintangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitarnya, antara lain dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana permukiman, sarana mandi cuci, sarana transportasi air, misalnya Simpang Tiga – Danau Panggang – Negara maupun Danau Panggang – Kapuas Kalimantan Tengah. Selain itu pula sebagai sarana perdagangan, dimana daerah simpang tiga Desa Harusan Telaga merupakan salah satu pasar ikan dari nelayan setempat yang beroperasi setiap minggu sekali dengan nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian budidaya ikan keramba, yang merupakan hasil unggulan produk desa setempat yang memanfaatkan daerah aliran sungai sebagai budidaya ikan.

Sungai Pamintangan juga merupakan sumber air untuk kebutuhan irigasi yang cukup potensial untuk dikembangkan yang terdapat di empat kecamatan daerah pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Amuntai Utara (1.500 ha), Amuntai Selatan (1.665 ha) dan Danau Panggang (1.335 ha).

2.2. Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2015 Mengalami Peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 225.386 jiwa. Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2015 meningkat dari tahun 2014 yang hanya 222.314 jiwa. Pada tahun 2015, Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah kecamatan Amuntai Tengah. Jumlah penduduk kecamatan Amuntai Tengah pada tahun 2015 mencapai 52.420 jiwa. Jumlah penduduk Amuntai Tengah meningkat dari tahun 2014 yang hanya 51.667 jiwa.

Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit pada tahun 2015 adalah kecamatan Paminggir. Jumlah penduduk kecamatan Paminggir pada tahun 2015 adalah 8.071 jiwa. Jumlah penduduk kecamatan paminggir mengalami peningkatan dari tahun 2014. Jumlah penduduk kecamatan Paminggir tahun 2014 hanya 7.962 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak kedua pada tahun 2015 adalah kecamatan Amuntai Selatan. Jumlah penduduk kecamatan Amuntai Selatan tahun 2015 adalah 28.755 jiwa. Pada tahun 2015 kecamatan Amuntai Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2014 yang hanya 28.366 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2015 adalah 1,38. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami perlambatan dari tahun 2014. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2014 mencapai 1,42. Pada tahun 2015, kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah kecamatan Amuntai Utara. Kecamatan Amuntai Utara pada tahun 2015 mengalami laju pertumbuhan 1,78. Laju pertumbuhan penduduk kecamatan Amuntai Utara tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2014. Laju pertumbuhan penduduk kecamatan Amuntai Utara tahun 2014 adalah 1,77. Pada tahun 2015 kecamatan dengan laju pertumbuhan paling lambat adalah kecamatan Haur Gading. Laju pertumbuhan penduduk kecamatan Haur Gading pada tahun 2015 hanya 0,98. Laju pertumbuhan penduduk kecamatan Haur Gading tahun 2014 hanya 1,00. Pada tahun 2015, kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk paling tinggi kedua adalah kecamatan Banjarang. Laju pertumbuhan penduduk kecamatan Banjarang tahun 2015 adalah 7,48. Laju pertumbuhan penduduk kecamatan Banjarang tahun 2015 mengalami perlambatan dari tahun 2014. Laju pertumbuhan penduduk kecamatan Banjarang tahun 2014 ialah 1,55.

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2015

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan Penduduk (%)	
			2013	2014	2015	2014	2015
1	Danau Panggang		20.737	21.021	21.296	1,37	1,31
2	Paminggir		7.849	7.962	8.071	1,44	1,37
3	Babirik		18.964	19.235	19.493	1,43	1,34

4	Sungai Pandan		27.337	27.698	28.056	1,32	1,29
5	Sungai Tabukan		14.488	14.659	14.833	1,18	1,19
6	Amuntai Selatan		27.977	28.366	28.755	1,39	1,37
7	Amuntai Tengah		50.907	51.667	52.420	1,49	1,46
8	Banjang		14.997	15.230	15.455	1,55	1,48
9	Amuntai Utara		21.194	21.569	21.952	1,77	1,78
10	Haur Gading		14.760	14.907	15.053	1,00	0,98
	Jumlah		219.210	222.314	225.386	1,42	1,38

BAB III
VISI, MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara

3.1.1. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi industri daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ingin dicapai. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para *stakeholders* dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan industry daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan industry daerah untuk menemukan perwujudan visi.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan saat ini, dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan potensi dan faktor strategis yang dimiliki daerah, Rancangan Visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mempertimbangkan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Utara serta visi industry Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Maka visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu:

***“Industri yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Sebagai
 Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumber Daya Lokal”***

Tabel 3.1. Perumusan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Indikator
Industri yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Sebagai	Mandiri, Unggul dan Berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya peran sektor industri. ▪ Meningkatnya pembangunan didukung investasi industri daerah.
Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumber Daya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan industry daerah sesuai potensi lokal

Visi	Pokok-pokok Visi	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat

Keterkaitan visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan visi Nasional dan visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: **Industri yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Sebagai Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumber Daya Lokal**, memiliki peran terhadap perwujudan visi Nasional Tahun, yaitu : **Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh**, serta visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: “ **Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Daerah pada Tahun 2035**” sebagai mana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 3.2. Keterkaitan Visi Pembangunan Industri Nasional, Provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Visi Nasional	Visi Provinsi Kalimantan Selatan	Visi Kabupaten Hulu Sungai Utara
Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh	Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Daerah pada Tahun 2035	Industri yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Sebagai Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumber Daya Lokal

3.1.2. Misi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pengelolaan industri berbasis sumber daya alam lokal .
2. Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Industri kreatif.
3. Peningkatan sistem distribusi yang efektif dan efisien.
4. Peningkatan penggunaan Produksi Dalam Negeri
5. Pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industry
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing

Tabel 3.3 . Sinkronisasi Rancangan Misi Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Misi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan

Nasional	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Utara
1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional	Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri	Pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industry
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional	Meningkatkan pengelolaan sumber daya unggulan daerah yang efisien yang mampu mendukung industri komoditas unggulan	Pengembangan dan pengelolaan industri berbasis sumber daya alam lokal
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau	Meningkatkan industri-industri hilir lanjutan yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah	Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Industri kreatif
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat		Peningkatan sistem distribusi yang efektif dan efisien
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional		
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan		Peningkatan penggunaan Produksi Dalam Negeri

3.2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Hulu Sungai Utara adalah:

1. Meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah unit usaha, sentra produksi, lapangan kerja, output, serta nilai tambah yang dihasilkan.
2. Terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai dengan tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan dengan industry besar. Hal tersebut juga ditandai dengan berkembangnya industri pendukung

skala kecil menengah, berkurangnya impor suku cadang, komponen dan bahan baku, serta meningkatnya penggunaan hasil produksi.

3. Meningkatnya jumlah industri yang berbasis pada hasil karya intelektual yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (knowledge-based) yang ditandai dengan meluasnya penggunaan teknologi informasi yang dapat mendinamisasi bisnis, serta tumbuhnya industri kecil menengah.
4. Meningkatnya persebaran IKM yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, pengkairahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial.
5. Meningkatnya ekspor produk IKM, baik dalam nilai, dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser ke arah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi/bernilai tinggi.
6. Terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni-budaya melalui kegiatan produktif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya utamanya yang berciri khas daerah dan mempunyai nilai sejarah maupun nilai seni yang tinggi, sehingga kekayaan seni dan budaya nasional tersebut sekaligus dapat berkembang karena dapat dijadikan sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

3.3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dicapai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2035 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 - 2035

No	Sasaran	Baseline 2015	Tahun			
			2020	2025	2030	2035
1	Pertumbuhan sektor industri (%)	4,33	4,72	5,33	5,84	6,55
2	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	10,62	11,34	12,72	13,91	15,25
3	Nilai produksi industri (Rp ribu)	87.856.069	94.005.993	100.155.918	106.305.843	112.455.768
4	Jumlah tenaga kerja sektor industri (orang)	34.117	36.505	38.893	41.281	43.669

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara antara 5,5% (enam persen) sampai dengan 6,0 % per tahun;
2. Inflasi 5% sampai dengan 5,5%
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi antar kementerian/lembaga/dinas dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2015 – 2035 tersebut dibutuhkan :

1. Keselarasan visi dan misi (*alignment vision and mission*) antara provinsi dan kabupaten/kota;
2. Komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, masyarakat dan pelaku dunia usaha melalui kepemimpinan Bupati, melalui prinsip-prinsip: kebersamaan (*togetherness*), kemandirian (*self-help*), keadilan dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketiga prinsip tersebut diwujudkan melalui pendekatan secara komprehensif, yaitu peningkatan modal sosial (*social capital*), pemberdayaan (*empowerment*), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), membangun saling kepercayaan (*trust each others*), dan komunikasi yang sehat (*health of communication*);
3. Pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

BAB IV

GAMBARAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

4.1. Perkembangan Ekonomi Daerah

4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara

Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara diukur dari besaran PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun dasar 2000 , menunjukkan perkembangan yang selalu meningkat selama periode 2013 sampai dengan 2015. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 mencapai 3,2 triliun rupiah atau naik sebesar 462,54 milyar rupiah dibanding tahun 2014 yang tercatat sebesar 2,7 triliun rupiah.

Tabel 4.1. Pertumbuhan PDRB Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2015

Tahun	Harga berlaku (Milyar Rupiah)	Harga konstan (Milyar Rupiah)
2013	2.526.362,80	2.288.014,86
2014	2.784.053,31	2.409.009,74
2015	3.246.593,52	2.553.517,69

Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015

Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2015

No	Sektor/Industri	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.26	2.92	(0.27)	8.04	1.50	4.69
2	Pertambangan dan Penggalian	9.59	8.02	4.14	7.54	2.01	6.26
3	Industri Pengolahan	6.42	10.27	9.24	4.74	4.33	7.00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.64	9.08	2.32	12.57	19.14	10.15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.18	3.08	4.56	10.71	5.34	5.37
6	Konstruksi	4.77	5.55	5.64	5.26	5.17	5.28
7	Perdagangan Besar dan Eceran	6.30	6.79	8.67	7.61	7.46	7.37
8	Transportasi dan Pergudangan	2.93	4.35	4.74	3.97	4.73	4.14
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	3.61	5.25	4.11	4.17	3.00	4.03
10	Informasi dan Komunikasi	4.08	6.25	4.98	7.39	7.22	5.98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.37	3.59	14.10	6.17	4.22	6.29
12	Real Estate	2.35	3.66	5.01	3.31	4.74	3.81
13	Jasa Perusahaan	3.45	4.05	4.76	5.83	5.27	4.67

14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	7.69	5.95	5.79	5.28	8.84	6.71
15	Jasa Pendidikan	5.45	5.11	5.98	5.75	7.13	5.88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.48	7.04	9.86	3.03	7.18	6.92
17	Jasa Lainnya	2.50	3.02	2.06	5.21	6.02	3.76
	Pertumbuhan PDRB HSU	6.42	5.40	5.34	5.98	5.31	5.69

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2015 perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara tumbuh sebesar 5,31 persen menurun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 5,98 dan tahun 2013 yang tumbuh mencapai 5,34 persen.

4.1.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sampai dengan tahun 2015 sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan dalam perekonomian kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu, program pembangunan diprioritaskan bidang pertanian yang disinergikan dengan bidang / sektor lain.

Tabel 4.3. Struktur PDRB Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2011-2015

(Persen/ *percentage*)

No	Sektor/Industri	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.74	19.09	18.28	18.65	18.27
2	Pertambangan dan Penggalian	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24
3	Industri Pengolahan	9.90	10.39	10.66	10.61	10.38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.72	0.72	0.70	0.75	0.74
6	Konstruksi	10.49	10.28	10.19	10.29	10.43
7	Perdagangan Besar dan Eceran	12.58	12.78	13.11	13.25	13.34
8	Transportasi dan Pergudangan	7.88	7.76	7.67	7.60	7.45
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	2.60	2.65	2.52	2.51	2.39
10	Informasi dan Komunikasi	3.78	3.76	3.66	3.64	3.55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.71	2.80	3.08	2.98	2.86
12	Real Estate	3.86	3.77	3.73	3.70	3.53
13	Jasa Perusahaan	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	11.90	12.14	12.77	12.65	13.31
15	Jasa Pendidikan	8.89	8.93	8.79	8.58	8.85
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.99	2.04	2.08	2.02	2.11
17	Jasa Lainnya	2.26	2.21	2.09	2.09	2.10
	PDRB HSU	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015

4.1.2. Pertumbuhan PAD

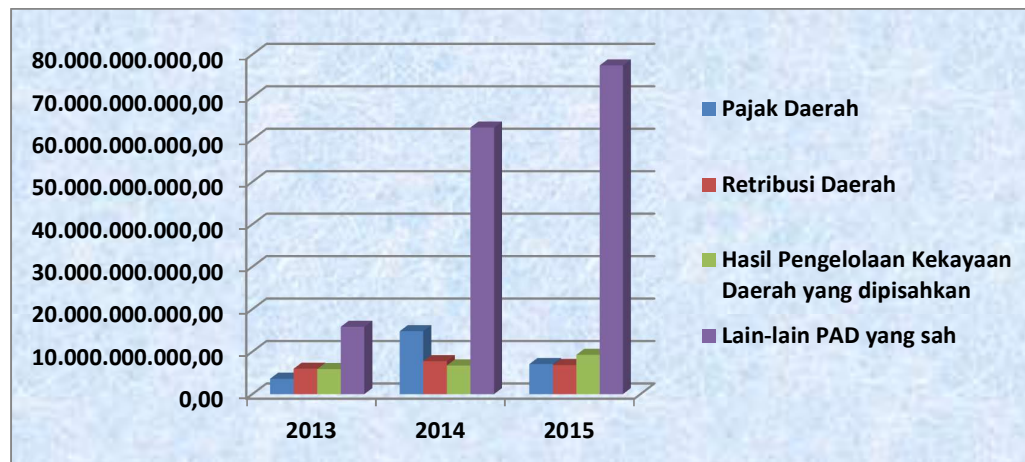
Secara keseluruhan nilai capaian kinerja terhadap perkembangan Penerimaan Asli Daerah (PAD) selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, melalui sumber-sumber pendapatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.4. Realisasi PAD Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2015

Indikator Kinerja Sasaran	2013	2014	2015
Pajak Daerah	3.616.250.000,00	14.824.639.919,00	7.080.850.377,00
Retribusi Daerah	5.982.444.150,00	7.757.903.303,00	6.848.752.815,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.900.000.000,00	6.752.407.074,00	9.260.370.902,44
Lain-lain PAD yang sah	15.863.669.600,00	62.797.383.419,35	77.416.513.693,23
TOTAL	31.362.363.750,00	92.003.509.511,35	100.606.487.787,67

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2015

Gambar 4.1. Grafik Realisasi PAD Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2015



4.2. PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita suatu wilayah merupakan salah satu indikator yang memperlihatkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk, namun demikian indikator yang lazim digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah dengan pendekatan pengeluaran per kapita dan PDRB per kapita.

Data rata-rata pendapatan (Income) per kapita digunakan untuk mendapatkan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah dan waktu tertentu. PDRB Per Kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PRDB dengan penduduk pada tahun yang sama di wilayah studi.

Tabel 4.5. PDRB Per Kapita ADHB Menurut Lapangan Usaha (Ribu Rp)
Tahun 2011–2015

No	Lapangan Usaha (Sektoral)	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	2,124	2,233	2,321	2,639	2,882
2	Pertambangan dan Penggalian	26	29	31	35	38
3	Industri Pengolahan	1,065	1,215	1,353	1,501	1,637
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7	8	7	9	12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	78	84	89	106	117
6	Konstruksi	1,129	1,202	1,294	1,456	1,645
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1,354	1,495	1,664	1,875	2,104
8	Transportasi dan Pergudangan	847	907	974	1,075	1,175
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	280	310	320	356	377
10	Informasi dan Komunikasi	407	440	465	515	560
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	292	327	392	422	452
12	Real Estate	415	441	473	523	556
13	Jasa Perusahaan	40	43	47	53	59
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	1,280	1,420	1,621	1,791	2,099
15	Jasa Pendidikan	957	1,044	1,117	1,214	1,396
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	215	239	264	286	333
17	Jasa Lainnya	243	259	266	296	331
	PDRB PER KAPITA	10,759	11,696	12,698	14,152	15,773

Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2016 (diolah)

PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2015, PDRB per kapita Hulu Sungai Utara mencapai 15,7 juta Rupiah dengan pertumbuhan atas harga berlaku sebesar 8,73 persen pada tahun 2012 dan berturut-turut sebesar 8,58; 11,44; dan 11,46 persen pada tahun 2013-2015.

4.3. Sektor Unggulan Industri Kab. Hulu Sungai Utara

4.3.1. Analisis LQ

Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis (basic sektor) dan sektor mana yang bukan sektor basis (non basic sektor). Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu sektor antara daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Perbandingan relatif ini dapat dinyatakan secara matematika sebagai berikut (Warpani 2001):

$$LQ = \frac{Si/s}{Ni/N}$$

Keterangan:

- LQ : Nilai Location Quotient
- Si : PDRB Sektor i di Kabupaten
- S : PDRB total di Kabupaten
- Ni : PDB Sektor i Provinsi Kalimantan Selatan
- N : PDB total di Provinsi Kalimantan Selatan

Satuan yang dapat digunakan untuk menghasilkan koefisien dapat menggunakan satuan jumlah buruh, atau hasil produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria (Warpani, 2001). Apabila hasil perhitungannya menunjukkan $LQ > 1$, berarti merupakan sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, sedangkan $LQ < 1$, berarti bukan sektor basis (sektor lokal/impor). Teknik ini memiliki asumsi bahwa semua penduduk di suatu daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional (regional). Bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor industri di daerah adalah sama dengan produktivitas pekerja dalam industri nasional. Setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor dan bahwa perekonomian bangsa yang bersangkutan adalah suatu perekonomian tertutup.

Analisis LQ memiliki kelebihan antara lain merupakan alat analisis sederhana yang dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan industri substitusi

impor potensial atau produk-produk yang bisa dikembangkan untuk ekspor dan menunjukkan industri-industri potensial (sektoral) untuk dianalisis lebih lanjut. Sedangkan kelemahannya antara lain merupakan indikator kasar yang deskriptif, merupakan kesimpulan sementara dan tidak memperhatikan struktur ekonomi setiap daerah. Analisis LQ ini juga digunakan untuk menghitung potensi produk unggulan dari hasil pemanfaatan sumber daya alam pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pariwisata pada beberapa wilayah dan dapat diketahui wilayah mana yang paling potensi untuk produk-produk tertentu sehingga dapat ditetapkan sebagai wilayah/daerah basis atau non basis.

4.3.2. Model LQ Sektor Basis PDRB

Pembahasan mengenai model basis ekonomi diarahkan untuk memahami bagaimana suatu wilayah sebagai bagian dari suatu wilayah yang lain dapat terbentuk, dan berbagai aktivitas yang menyertai dari pembentukan dan pengisian kabupaten. Analisis ini dapat juga dijadikan sebagai landasan bagi analisis pengembangan potensi sektor ekonomi di suatu wilayah.

Analisis LQ pada Kabupaten Hulu Sungai Utara diterapkan dengan membandingkan aktivitas perekonomian (PDRB) Hulu Sungai Utara dengan aktivitas perekonomian (PDRB) Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel berikut merupakan hasil perhitungan besaran nilai LQ per sektor dalam perekonomian Hulu Sungai Utara untuk tahun 2011 sampai dengan 2015.

Tabel 4.6. Perhitungan besaran nilai LQ per sektor Hulu Sungai Utara untuk tahun 2011 sampai dengan 2015

No	Sektor/Industri	Nilai LQ					Rata-Rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.47	2.47	2.37	2.38	2.24	2.39
2	Pertambangan dan Penggalian	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
3	Industri Pengolahan	1.41	1.46	1.53	1.50	1.42	1.46
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.22	2.34	2.47	2.32	1.85	2.24
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.71	3.73	3.77	3.66	3.48	3.67
6	Konstruksi	2.90	2.86	2.83	2.68	2.46	2.75
7	Perdagangan Besar dan Eceran	3.12	2.98	2.97	2.87	2.72	2.93
8	Transportasi dan Pergudangan	2.87	2.73	2.58	2.41	2.23	2.56

9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	2.89	2.81	2.70	2.52	2.37	2.66
10	Informasi dan Komunikasi	2.32	2.32	2.32	2.23	2.19	2.27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.91	1.71	1.67	1.63	1.55	1.69
12	Real Estate	3.55	3.46	3.40	3.18	3.06	3.33
13	Jasa Perusahaan	1.33	1.26	1.20	1.12	1.05	1.19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	4.41	4.21	3.97	3.87	3.58	4.01
15	Jasa Pendidikan	4.48	4.36	4.28	4.09	3.72	4.19
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.50	2.45	2.44	2.26	2.07	2.34
17	Jasa Lainnya	4.17	4.12	4.05	3.72	3.43	3.90
	LQ HSU	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2016 (diolah)

Dari tabel di atas terlihat nilai LQ-nya sektor dapat ditunjukkan bahwa pada pada tahun 2015 dan nilai rata-rata per tahun, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki banyak sektor yang bias menjadi andalan (basis) bila dibandingkan dengan nProvinsi Kalimantan Selatan karena memiliki nilai di atas 1 (satu) dan sektor lainnya memiliki nilai di bawah 1 yang bukan merupakan sektor basis. Dengan demikian sektor andalan (basis) yang primer untuk dapat dikembangkan ke industri adalah Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, serta industri pengolahan karena sektor lainnya adalah sektor tersier atau jasa.

4.3.3. Model LQ Sub Sektor Basis PDRB

Hasil perhitungan besaran nilai LQ yang dapat menjadi andalan (Basis) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan industry pengolahan. Besaran Nilai LQ Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat menjadi sektor andalan (basis) berdasarkan kontribusi sub sektor yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.7. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011-2015

No	Sub Sektor	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.47	2.47	2.37	2.38	2.24	2.39

1.1	<i>Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian</i>	1.92	1.84	1.64	1.69	1.72	1.76
	<i>a. Tanaman Pangan</i>	3.05	2.98	2.52	2.69	2.58	2.76
	<i>b. Tanaman Hortikultura</i>	1.89	1.76	1.61	1.51	1.36	1.63
	<i>c. Tanaman Perkebunan</i>	0.41	0.41	0.41	0.40	0.46	0.42
	<i>d. Peternakan</i>	3.12	3.00	3.02	2.99	2.75	2.98
	<i>e. Jasa Pertanian dan Perburuan</i>	3.60	3.36	3.24	2.78	2.55	3.11
1.2	<i>Kehutanan dan Penebangan Kayu</i>	0.55	0.54	0.52	0.50	0.47	0.52
1.3	<i>Perikanan</i>	4.85	4.95	5.05	4.94	4.02	4.76

Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2016 (diolah)

Dari tabel di atas terlihat dari nilai LQ-nya Sub sektor, dapat ditunjukkan bahwa rata-rata sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian menjadi andalan (basis) dengan rata-rata nilai LQ 1,76% dengan kontribusi nilai tanaman pangan, tanaman Hortikultura, Peternakan, Jasa Pertanian dan Perburuan. Selanjutnya untuk sub sektor Perikanan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu 4,76%. Selanjutnya Hasil perhitungan besaran nilai LQ sektor sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2011 sampai dengan 2015 maka dapat diketahui bahwa yang dapat menjadi sub sektor andalan (basis) Sektor industri pengolahan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.8. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011-2015

No	Sektor	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
1	Industri Pengolahan	1.41	1.46	1.53	1.50	1.42	1.46
a	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	Industri Makanan dan Minuman	0.90	0.92	0.93	0.90	0.84	0.90
c	Industri Pengolahan Tembakau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	17.50	17.56	17.54	16.40	15.09	16.82
e	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	1.28	1.29	1.29	1.26	1.21	1.26
g	Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman	2.37	2.48	2.50	2.40	2.23	2.40
h	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	0.86	0.83	0.81	0.78	0.74	0.81

i	<i>Industri karet, barang dari karet dan plastic</i>	2.85	3.03	3.53	3.56	3.65	3.32
j	Industri Barang Galian bukan Logam	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
k	Industri Logam Dasar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l	<i>Industri Barang Logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik</i>	5.13	5.34	5.40	5.25	4.97	5.22
m	Industri Mesin dan Perlengkapan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
n	Industri Alat Angkutan	0.79	0.81	0.81	0.80	0.76	0.79
o	<i>Industri Furnitur</i>	35.00	35.30	34.82	34.40	32.11	34.33
p	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0.79	0.77	0.80	0.80	0.73	0.78

Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2016 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil perhitungan LQ secara keseluruhan rata-rata sektor industry pengolahan yaitu 1,46% yang berarti dapat dijadikan sektor andalan (basis). Sub sektor yang mendominasi hasil perhitungang LQ Sektor Industri Pengolahan yaitu sub sektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi dengan rata-rata 16,82%, sub sektor Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya dengan rata-rata 1,26%, Sub Sektor Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman dengan rata-rata 2,40%, Sub Sektor Industri Barang Logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik dengan rata-rata 5,22%, dan Sub Sektor Industri Furnitur yang rata-rata mencapai 34,33%.

Sektor andalan (basis) yang primer untuk dapat dikembangkan ke industri adalah Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, serta industri pengolahan, dengan demikian maka nilai LQ Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara khusus untuk komoditas tanaman pangan dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.9. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan Per Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Kedelai	Kacang Hijau	Rata-rata
1	Danau Panggang	1.01	0.53	1.29	0.58	-	-	-	0.49
2	Paminggir	1.02	-	-	-	-	-	-	0.15
3	Babirik	1.01	1.04	0.66	0.57	-	-	-	0.47
4	Sungai Pandan	1.00	0.57	1.68	1.51	-	-	-	0.68

5	Sungai Tabukan	0.98	0.77	1.49	5.15	-	-	-	1.20
6	Amuntai Selatan	1.02	0.06	-	-	-	-	-	0.15
7	Amuntai Tengah	0.97	1.87	-	1.08	8.87	-	-	1.83
8	Banjang	1.00	1.38	2.12	-	0.21	8.81	8.01	3.08
9	Amuntai Utara	1.00	2.31	1.47	0.39	-	-	0.98	0.88
10	Haur Gading	1.01	0.58	-	-	-	-	-	0.23
	LQ Tanaman Pangan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2016 (diolah)

Keterangan:

LQ > 1 : Sektor Basis

LQ < 1 : Bukan Sektor Basis/Kecenderungan Impor

LQ = 1 : Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Wilayah itu Sendiri

Berdasarkan hasil LQ rata-rata berdasarkan jumlah produksi, maka ada 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat menjadi basis komoditas tanaman pangan karena nilai LQ yang di atas 1 yaitu Kecamatan Sungai Tabukan, Amuntai Tengah, Banjang. Untuk komoditas padi dan jagung, hampir tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Hulu sungai Utara. Selanjutnya nilai LQ Sub Sektor Perikanan Menurut kecamatan dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.10. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Rata-rata
1	Danau Panggang	2.04	0.21	1.13
2	Paminggir	0.27	1.56	0.91
3	Babirik	0.40	1.45	0.93
4	Sungai Pandan	0.30	1.53	0.92
5	Sungai Tabukan	1.15	0.88	1.02
6	Amuntai Selatan	1.37	0.72	1.04
7	Amuntai Tengah	0.34	1.50	0.92
8	Banjang	0.38	1.47	0.92
9	Amuntai Utara	2.00	0.24	1.12
10	Haur Gading	0.10	1.68	0.89
	LQ Produksi Sektor Perikanan	1.00	1.00	1.00

Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2016 (diolah)

Keterangan:

LQ > 1 : Sektor Basis

LQ < 1 : Bukan Sektor Basis/Kecenderungan Impor

LQ = 1 : Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Wilayah itu Sendiri

Berdasarkan hasil LQ rata-rata berdasarkan jumlah produksi, maka ada 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat menjadi basis komoditas Perikanan karena nilai LQ yang di atas 1 yaitu Kecamatan Danau Panggang, Sungai Tabukan, Amuntai Selatan dan Amuntai Utara. Selanjutnya Nilai LQ Sub Sektor Peternakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.11. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Peternakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Itik	Ayam Ras Pedaging	Ayam Buras	Kerbau	Sapi	Rata-rata
1	Danau Panggang	1.20	0.07	3.55	0.20	-	1.00
2	Paminggir	0.69	-	0.24	458.03	-	91.79
3	Babirik	0.97	0.07	4.51	0.10	-	1.13
4	Sungai Pandan	1.37	0.73	0.50	-	4.96	1.51
5	Sungai Tabukan	1.81	0.20	0.64	0.27	2.11	1.01
6	Amuntai Selatan	0.64	1.29	1.40	-	0.35	0.74
7	Amuntai Tengah	0.23	2.06	0.27	-	0.92	0.70
8	Banjang	1.48	0.23	1.86	-	28.12	6.34
9	Amuntai Utara	1.02	0.96	1.09	-	-	0.61
10	Haur Gading	0.71	1.36	0.88	-	0.97	0.78
	LQ Sub Sektor Peternakan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2016 (diolah)

Berdasarkan hasil LQ rata-rata berdasarkan jumlah produksi, maka ada 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat menjadi basis komoditas Peternakan karena nilai LQ yang di atas 1 yaitu Kecamatan Danau Panggang, Paminggir, Babirik, Sungai Pandan, Sungai Tabukan, dan Banjang. Selanjutnya Nilai LQ Sub Sektor Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.12. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Kecamatan	Sawit Rakyat	Sawit Swasta	Karet	Kelapa	Sagu	Purun	Rata-rata
1	Danau Panggang	-	-	-	10.75	13.49	57.74	13.66
2	Paminggir	-	-	-	5.88	9.45	87.05	17.06
3	Babirik	-	-	-	22.85	14.74	9.49	7.85
4	Sungai Pandan	-	-	2.27	23.45	15.17	2.97	7.31
5	Sungai Tabukan	-	-	-	22.21	17.67	3.67	7.26
6	Amuntai Selatan	-	-	27.60	9.39	19.53	8.00	10.75
7	Amuntai Tengah	-	-	13.61	17.50	17.68	2.38	8.53
8	Banjang	1.06	1.06	0.17	0.18	0.20	0.03	0.45
9	Amuntai Utara	-	-	34.76	14.37	9.84	6.92	10.98
10	Haur Gading	-	-	11.43	14.98	18.10	13.53	9.67
LQ Sub Sektor Perkebunan		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: BPS Hulu Sungai Utara, 2016 (diolah)

Berdasarkan hasil LQ rata-rata jumlah produksi, maka ada 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat menjadi basis komoditas Perkebunan karena nilai LQ yang di atas 1. Komoditas Perkebunan yang menyebar di Sembilan kecamatan didominasi oleh komoditas kelapa, sagu, dan purun. Sedangkan untuk komoditas Sawit yang merupakan komoditas unggulan Provinsi Kalimantan Selatan hanya di Kecamatan Banjang dan untuk komoditas karet hanya tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Pandan, Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, dan Haur Gading.

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) juga sebagai sentra industri kerajinan, pengolahan meubel kayu dan alumunium sebagai komoditas unggulan. Sebagai daerah yang tidak banyak memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA), Kabupaten HSU terus berkreasi dengan memajukan komoditas unggulannya tersebut untuk dijadikan sebagai potensi pendapatan daerah. Sektor andalan (basis) yang primer untuk dapat dikembangkan ke industri adalah selanjutnya yaitu industri pengolahan. Berdasarkan nilai LQ sector industry pengolahan maka sub sector industry kerajinan merupakan sector andalan (basis) karena nilai LQ yang di atas 1. Sub sector industry

kerajinan menurut kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan pada table berikut.

Tabel 4.13. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Kerajinan Menurut Kecamatan dan komoditas Hasil Produksi di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Kecamatan	PRODUKSI KERAJINAN											Rata-rata	
		Anyaman Purun	Anyaman Bambu	Anyaman Rotan/Lupu	Anyaman Eceng Gondok	Anyaman Plastik	Anyaman Bamban	Atap/Lampit Rumbia	Lampit Rotan	Kerajinan Ukiran	Pembuatan Jala	Kembang Dalam Botol		
1	Danau Panggang	1.17	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	0.46	-	0.16
2	Paminggir	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11
3	Babirik	0.98	-	-	1.88	-	-	-	-	-	-	6.27	-	0.83
4	Sungai Pandan	-	-	18.85	-	-	-	-	-	-	-	26.58	-	4.13
5	Sungai Tabukan	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11
6	Amuntai Selatan	1.05	-	-	3.22	-	-	-	2.03	2.17	0.17	-	-	0.79
7	Amuntai Tengah	1.00	-	-	0.45	-	-	-	6.51	6.02	-	-	-	1.27
8	Banjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Amuntai Utara	-	-	2.29	-	21.38	21.38	21.38	-	-	-	-	-	6.04
10	Haur Gading	0.99	4.39	2.35	-	-	-	-	-	-	-	-	4.39	1.10
	Jumlah	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Hulu Sungai Utara, 2016 (diolah)

Keterangan:

LQ > 1 : Sektor Basis

LQ < 1 : Bukan Sektor Basis/Kecenderungan Impor

LQ = 1 : Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Wilayah itu Sendiri

Berdasarkan hasil LQ rata-rata jumlah produksi, maka ada 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat menjadi basis komoditas Produksi industri kerajinan karena nilai LQ yang di atas 1. Kerajinan Anyaman Purun mendominasi pada kecamatan Danau Panggang, Paminggir, Sungai Tabukan, Amuntai Selatan, Amuntai Tengah sedangkan untuk Anyaman bambu hanya terbatas pada kecamatan Haur Gading. Sedangkan basis komoditas Anyaman Rotan/lupu terdapat pada Kecamatan Sungai Pandan, Amuntai Utara, dan Haur Gading. Selanjutnya basis komoditas Anyaman eceng gondok terdapat pada Kecamatan Amuntai Selatan dan Babirik.

Basis (andalan) komoditas Anyaman plastik, bamban, atap/lampit rumbia hanya terdapat pada Kecamatan Amuntai Utara. Kemudian untuk komoditas anyaman lampit rotan dan kerajinan ukiran menjadi unggulan Kecamatan Amuntai Selatan dan Amuntai Tengah. Selanjutnya Pembuatan Jala terdapat menjadi unggulan pada Kecamatan Babirik dan Sungai Pandan.

Berdasarkan nilai LQ sector industry pengolahan maka sub sector industry Bahan Bangunan merupakan sector andalan (basis) karena nilai LQ yang di atas 1. Sub

sector industry Bahan Bangunan menurut kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan pada table berikut.

Tabel 4.14. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Kimia Bahan Bangunan Menurut Kecamatan berdasarkan komoditas Hasil Produksi

No.	Kecamatan	Sub Sektor Kimia Bahan Bangunan				Rata-rata
		Meubel Rotan	Meubel Bambu	Meubel Kayu	Pembuatan Perahu	
1	Danau Panggang	-	-	-	13.43	3.36
2	Paminggir	-	-	-	-	-
3	Babirik	-	-	-	13.43	3.36
4	Sungai Pandan	-	-	-	13.43	3.36
5	Sungai Tabukan	-	-	-	-	-
6	Amuntai Selatan	-	-	1.23	-	0.31
7	Amuntai Tengah	-	-	1.20	0.27	0.37
8	Banjang	-	-	-	-	-
9	Amuntai Utara	-	-	-	-	-
10	Haur Gading	9.14	9.14	-	-	4.57
LQ Sektor Kimia Bahan Bangunan		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Hulu Sungai Utara, 2016 (diolah)

Keterangan:

LQ > 1 : Sektor Basis

LQ < 1 : Bukan Sektor Basis/Kecenderungan Impor

LQ = 1 : Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Wilayah itu Sendiri

Berdasarkan hasil LQ rata-rata jumlah produksi, maka ada 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat menjadi basis komoditas Produksi sub sector kimia bahan bangunan karena nilai LQ yang di atas 1. Basis meubel rotan dan meubel bambu merupakan produk unggulan Kecamatan Haur Gading. Kemudian Basis meubel kayu merupakan unggulan Kecamatan Amuntai Selatan dan Amuntai Tengah, Sedangkan Basis komoditas Pembuatan Perahu merupakan produk unggulan Kecamatan Danau Panggang, Babirik, dan Sungai Pandan. Selanjutnya hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Industri Logam Menurut Kecamatan berdasarkan komoditas Hasil Produksi disajikan pada table berikut.

Tabel 4.15. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Industri Logam Menurut Kecamatan berdasarkan komoditas Hasil Produksi

No	Kecamatan	Sub Sektor Industri Logam				Rata-rata
		Meubel Aluminium	Bengkel Motor	Las/ bengkel/ alsintan	Daur Ulang Karet	
1	Danau Panggang	-	4.53	0.38	-	1.23
2	Paminggir	-	4.83	-	-	1.21
3	Babirik	-	4.83	-	-	1.21
4	Sungai Pandan	1.39	0.60	-	-	0.50
5	Sungai Tabukan	-	4.83	-	-	1.21
6	Amuntai Selatan	1.30	0.37	0.65	-	0.58
7	Amuntai Tengah	0.84	1.06	1.56	2.11	1.39
8	Banjang	-	4.83	-	-	1.21
9	Amuntai Utara	-	4.83	-	-	1.21
10	Haur Gading	-	4.83	-	-	1.21
LQ Sub Sektor Industri Logam		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Hulu Sungai Utara, 2016 (diolah)

Keterangan:

LQ > 1 : Sektor Basis

LQ < 1 : Bukan Sektor Basis/Kecenderungan Impor

LQ = 1 : Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Wilayah itu Sendiri

Berdasarkan hasil LQ rata-rata jumlah produksi, maka ada 8 (Delapan) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat menjadi basis komoditas Produksi sub sector logam karena nilai LQ yang di atas 1. Basis Meubel Aluminium merupakan produk unggulan Kecamatan Sungai Pandan dan Kecamatan Amuntai Tengah. Kemudian Basis bengkel motor hamper menjadi basis pada setiap kecamatan, Sedangkan Basis las, bengkel/alsintan dan daur ulang karet merupakan basis Kecamatan Amuntai Tengah. Selanjutnya hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Pangan Menurut Kecamatan berdasarkan komoditas Hasil Produksi disajikan pada table berikut.

Tabel 4.16. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Pangan Menurut Kecamatan berdasarkan komoditas Hasil Produksi

No	Kecamatan	Sub Sektor Pangan						Rata-rata
		Kerupuk Ikan/Itik	Kue Kering	Telur Asin	Dendeng Itik	Isi Ulang Air Mineral	Minuman Segar	
1	Danau Panggang	-	-	-	-	8.63	10.35	3.16
2	Paminggir	-	-	-	-	-	-	-
3	Babirik	-	-	-	-	5.18	31.06	6.04
4	Sungai Pandan	-	2.25	0.61	-	0.31	1.33	0.75
5	Sungai Tabukan	-	-	-	-	10.35	-	1.73
6	Amuntai Selatan	-	-	5.01	-	1.25	-	1.04
7	Amuntai Tengah	2.21	-	0.99	2.21	0.82	-	1.04

8	Banjang	-	2.01	-	-	2.59	-	0.77
9	Amuntai Utara	-	-	-	-	10.35	-	1.73
10	Haur Gading	-	-	-	-	-	-	-
LQ Sub Sektor Pangan		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Hulu Sungai Utara, 2016 (diolah)

Keterangan:

LQ > 1 : Sektor Basis

LQ < 1 : Bukan Sektor Basis/Kecenderungan Impor

LQ = 1 : Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Wilayah itu Sendiri

Berdasarkan hasil LQ rata-rata jumlah produksi, maka ada 6 (Enam) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat menjadi basis komoditas Produksi sub sector Pangan karena nilai LQ yang di atas 1. Basis kerupuk ikan itik merupakan produk unggulan Kecamatan Amuntai Tengah, kue kering menjadi basis Kecamatan Sungai Pandan dan banjang, Telur asin menjadi basis Kecamatan Amuntai Selatan, Dendeng itik menjadi basis Kecamatan Tengah, Isi ulang air mineral menjadi basis hamper semua kecamatan, Minuman Segar menjadi basis Kecamatan Danau Panggang, Baririk, dan Sungai Pandan. Selanjutnya hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Sandang Menurut Kecamatan berdasarkan komoditas Hasil Produksi

Tabel 4.17. Hasil Perhitungan Model LQ Sub Sektor Sandang Menurut Kecamatan berdasarkan komoditas Hasil Produksi

No	Kecamatan	Sub Sektor Sandang			Rata-rata
		Kopiah Haji/Peci	Konfeksi	Sulam Bordir/tangan	
1	Danau Panggang	-	-	-	-
2	Paminggir	-	-	-	-
3	Babirik	-	-	-	-
4	Sungai Pandan	-	2.26	0.49	0.92
5	Sungai Tabukan	-	-	1.47	0.49
6	Amuntai Selatan	-	-	-	-
7	Amuntai Tengah	41.15	-	-	13.72
8	Banjang	-	-	-	-
9	Amuntai Utara	-	-	-	-
10	Haur Gading	-	-	-	-
LQ Sub Sektor Sandang		1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Hulu Sungai Utara, 2016 (diolah)

Keterangan:

LQ > 1 : Sektor Basis

LQ < 1 : Bukan Sektor Basis/Kecenderungan Impor

LQ = 1 : Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Wilayah itu Sendiri

Berdasarkan hasil LQ rata-rata jumlah produksi, maka ada 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat menjadi basis komoditas Produksi sub sector sandang karena nilai LQ yang di atas 1 yaitu Kecamatan Amuntai tengah dengan basis produk kopiah/peci.

4.4. Infra Struktur Dasar dan Penataan Wilayah

4.4.1. Infrastruktur Jalan Darat

Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dibagi kedalam tiga status yaitu Jalan Negara yang pengelolaannya dibawah Pemerintah Pusat, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten.

Tabel 4.18. Infrastruktur Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015

No	Kondisi Jalan	Status Jalan (Km)		
		Negara	Provinsi	Kabupaten
1	Baik	28,45	27,40	95,53
2	Sedang	-	-	24,80
3	Rusak	-	6,86	140,72
4	Rusak Berat	-	-	67,77
		28,45	34,26	328,82

Sumber: Dinas PU Kab. Hulu Sungai Utara, 2016

Berdasarkan data diatas, kondisi baik kategori baik untuk status jalan Negara yaitu 28,45 Km, Provinsi 27,40 Km dan Kabupaten 95,53 Km. Sedangkan kondisi jalan rusak untuk status jalan provinsi yaitu 6,86 Km dan Kabupaten 140,72 Km serta untuk kondisi jalan rusak berat hanya 67,77 Km yang masuk dalam status jalan kabupaten. Selanjutnya Kondisi jalan kabupaten menurut kecamatan disajikan pada table berikut.

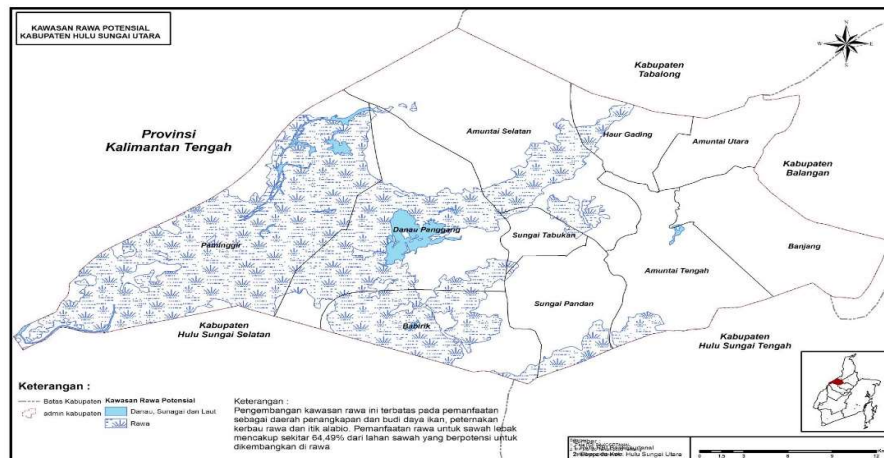
Tabel 4.19. Infrastruktur Jalan Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Kecamatan Tahun 2015 Sumber: Dinas PU Kab. Hulu Sungai Utara, 2016

No	Kecamatan	Kondisi Jalan				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Danau Panggang	20,388	1,446	2,8	34,823	59,457
2	Paminggir	-	0,2	2	0,75	2,950
3	Babirik	2,3	0,7	1,2	12,748	16,948
4	Sungai Pandan	6,2	3,319	5,955	12,857	28,331
5	Sungai Tabukan	-	0,85	2,55	1,85	5,250
6	Amuntai Selatan	16,735	3,55	11,75	11,978	44,013
7	Amuntai Tengah	25,007	6,2	10,194	27,415	68,816
8	Banjang	1,265	3,43	13,15	21,039	38,884
9	Amuntai Utara	3,73	4,202	15,67	13,039	36,641
10	Haur Gading	19,91	0,9	2,5	4,223	27,533
	Jumlah	95,535	24,797	67,769	140,722	328,823

4.4.2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Kawasan Rawa Potensial

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan daerah hutan basah / rawa yang terdapat di hampir 89% luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kawasan rawa ini potensial digunakan untuk sektor pertanian dan sektor perikanan. Pengembangan kawasan rawa ini terbatas pada pemanfaatan sebagai daerah penangkapan dan budidaya ikan, peternakan kerbau rawa dan itik Alabio. Pemanfaatan rawa untuk sawah lebak mencakup sekitar 64,49% dari lahan sawah yang berpotensi untuk dikembangkan di rawa. Ekosistem rawa, selain berperan penting dalam menjaga ekosistem dan lingkungan alami yang lebih luas, terbukti telah berperan penting pula terhadap struktur ekonomi dan pendapatan daerah, terutama melalui aktivitas sektor pertaniannya. Lebih jelasnya Rencana Kawasan Strategis Rawa Potensial Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan pada gambar berikut.



Gambar 4.2. Rencana Kawasan Strategis Rawa Potensial Kabupaten Hulu Sungai Utara

Seperti telah disebutkan, sektor yang sangat berperan penting pada sektor pertanian Kabupaten HSU adalah sub sektor perikanan dan sub sektor tanaman pangan. Hal ini dikarenakan Kabupaten HSU memiliki area rawa dengan genangan pasang surut dan monotoon seluas kurang lebih 79.450 hektar yang merupakan potensi bagi pengembangan pertanian tanaman pangan dan areal tangkapan ikan di perairan umum serta budidaya perikanan tersebar secara merata di hampir seluruh wilayah kecamatan, lahan rawa tetap mampu menjawab dan melayani tingkat pertumbuhan

ekonomi dan kegiatan pendukungnya. Hal ini dibuktikan dari adanya alternatif kegiatan berdagang di atas perahu (warung terapung, restoran terapung, dan sebagainya) di sepanjang sungai Paminggir, yaitu mulai danau Panggang sampai Paminggir dan Tambakan.

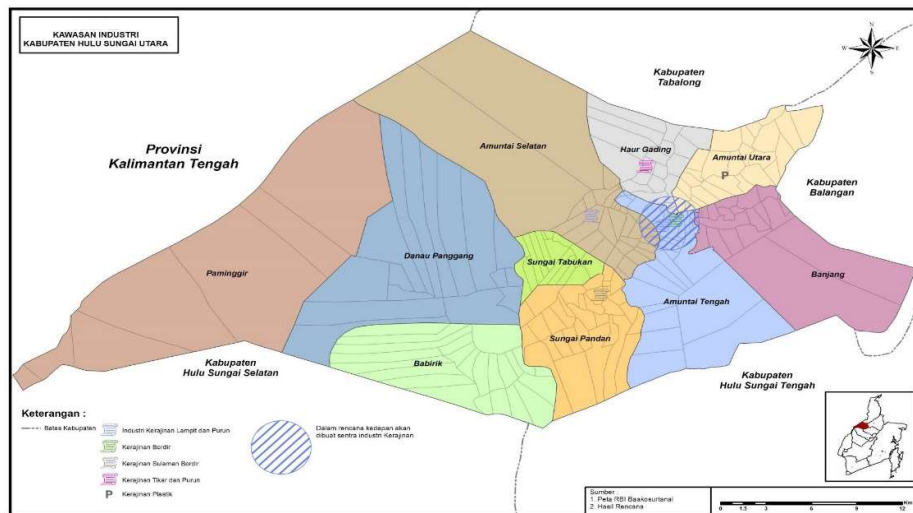
b. Kawasan Strategis Ekonomi

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan wilayah rawa dengan mata pencaharian penduduk adalah bercocok tanam. Namun diwaktu senggang para penduduk juga melakukan usaha kerajinan seperti tikar dan meubel. Hal ini didukung juga oleh ketersediaan bahan-bahan mentah yang melimpah serta keahlian yang turun temurun. Kerajinan merupakan kegiatan masyarakat yang sudah berkembang secara turun-temurun, terutama dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia secara melimpah di daerah tersebut, seperti kayu, rotan dan purun. Hasil kerajinan ini umumnya dijual, baik di pasar lokal (di Amuntai), atau dikirim ke Jawa. Kelompok masyarakat yang menggeluti bidang industri rumah tangga di kawasan rawa Kabupaten HSU sebagian besar adalah para ibu rumah tangga dan kaum perempuan. Di salah satu sentra kerajinan juga terdapat lembaga yang mewadahi aktivitas produktif ini, berupa kelompok pengrajin, yang dikelola oleh kaum pemuda, termasuk remaja putri.

Kerajinan rotan yang menghasilkan tikar rotan, atau yang dikenal sebagai lampit, merupakan kegiatan home industry yang di kawasan rawa ini. Hasil produksi lampit rotan selain dipasarkan untuk memenuhi permintaan pasar lokal dan regional, juga telah berhasil menembus pasar ekspor. Untuk kawasan regional, lampit rotan dipasarkan ke Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Provinsi Kalimantan Tengah, hingga Jawa dan Bali. Sementara itu, lampit juga dipasarkan ke Singapura, Malaysia, Jepang, Taiwan dan Korea. Selain berfungsi sebagai tikar, lampit yang bahan bakunya banyak disuplai dari Kalimantan Tengah ini juga digunakan sebagai penghias/penutup dinding di Jepang.

Komoditas kerajinan tangan lainnya adalah anyaman purun. Tanaman ini juga merupakan vegetasi di rawa. Selain dianyam menjadi tikar, purun juga dapat dibuat menjadi topi, keranjang, dan sebagainya. Kebanyakan hasil anyaman purun ini belum memasuki tahap finalisasi/finishing, karena produk setengah jadinya langsung

dipasarkan ke Bali. Tikar purun banyak diproduksi di Desa Banyu Hirang, yang merupakan sentra anyaman purun. Saat ini kerajinan purun tengah mengalami kendala bahan baku yang sifatnya terbatas (diambil langsung dari alam tanpa budidaya). Kerajinan Bordir juga dihasilkan di kawasan rawa HSU. Berlokasi di beberapa sentra bordir di sekitar Kota Amuntai, kerajinan yang satu ini sifatnya berdasarkan pesanan dari konsumen/pelanggan. Hasil produksi sebagian besar dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Selain untuk memenuhi kebutuhan lokal, untuk beberapa jenis komoditas kerajinan tangan dari daerah rawa HSU sudah dapat diekspor.



Gambar 4.3 Rencana Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara

Adanya potensi ekspor yang besar serta dapat meningkatkan pendapatan daerah maka sentra-sentra kerajinan merupakan daerah strategis untuk meningkatkan perekonomian, sehingga diperlukan pengelolaan lebih lanjut khususnya budidaya tanaman purun sebagai bahan baku.

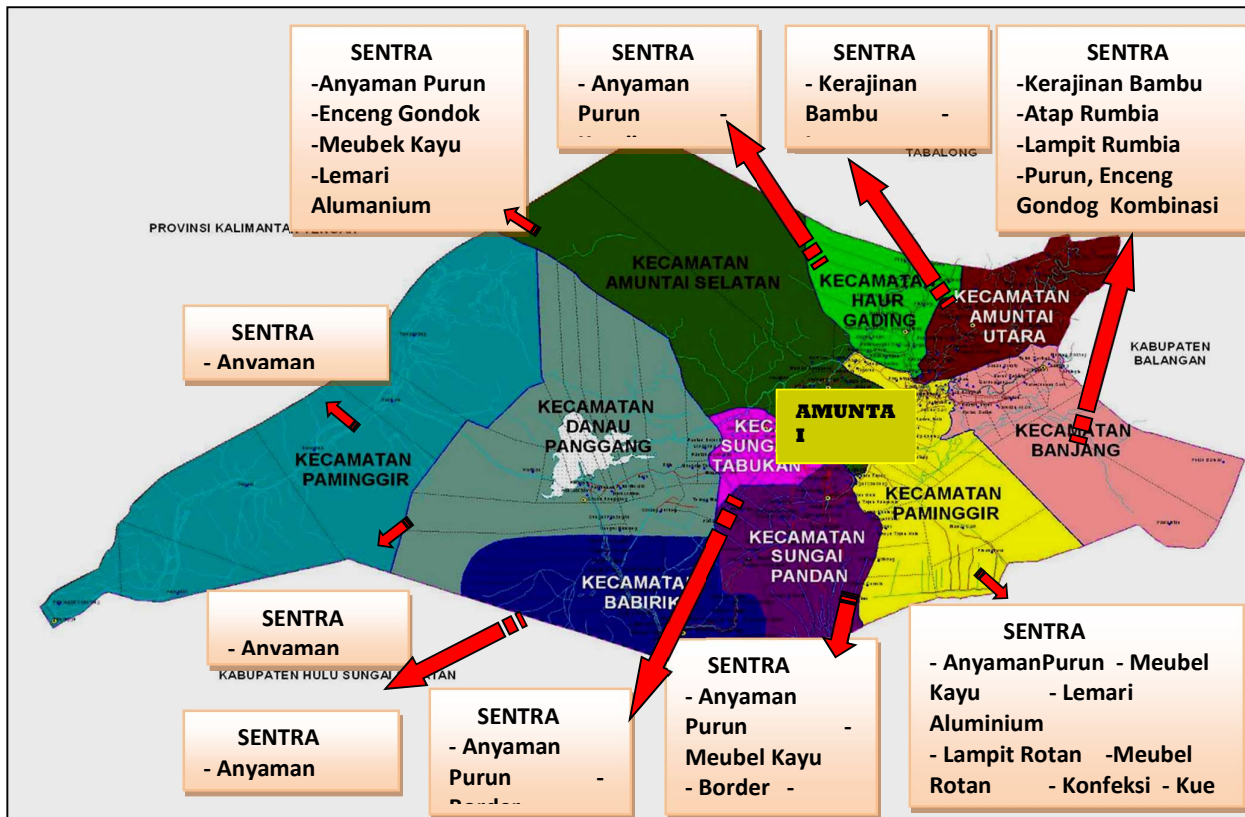
Gagasan strategis yang bertujuan untuk mengembangkan sentra industri sekaligus menjadi ikon setiap kecamatan adalah melalui peningkatan fasilitasi dan intervensi pengembangan sentra-sentra industri di setiap kecamatan sebagai berikut :

1. Sentra Anyaman Purun di Kecamatan Amuntai Selatan.
2. Sentra Anyaman Rotan/ Lupu di Kecamatan Amuntai Utara.
3. Sentra Anyaman dan Meubel Eceng Gondok di kecamatan Amuntai Selatan, Danau Panggang, dan Haur Gading.

4. Sentra Sulam Bordir di Kecamatan Sungai Pandan.
5. Sentra Anyaman Bamban di Kecamatan Amuntai Utara

Pengembangan sentra-sentra tersebut menambah kekayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal sentra industri yang telah ada sebelumnya, yaitu :

- a. Sentra meubel kayu di kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Selatan, dan Sungai Pandan
- b. Sentra meubel rotan di kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Utara, dan Haur Gading.
- c. Sentra meubel aluminum di kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Selatan, dan Sungai Pandan.
- d. Sentra meubel bambu di kecamatan Haur Gading, Banjang, dan Amuntai Tengah.



GAMBAR 4.3. SEBARAN SENTRA INDUSTRI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Kawasan sentra industri yang dianggap sangat produktif dan merupakan basis sektor/subsektor/program yang dapat mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan daerah sesuai potensi sumber daya dan ekosistemnya. Kawasan-kawasan tersebut adalah sentra-sentra industri kecil, menengah dan sentra kerajinan.

Konsep kawasan adalah wilayah yang berbasis pada keberagaman fisik dan ekonomi tetapi memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu sama lain secara fungsional demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kawasan sentra industri didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai fungsi tertentu, dimana kegiatan ekonominya, sektor dan produk unggulannya, mempunyai potensi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Kawasan ini membentuk suatu kluster. Kawasan tersebut dapat berupa kluster industri, tergantung dari kegiatan ekonomi yang dominan dalam kawasan itu.

Tujuan Rencana Pembangunan industry kabupaten adalah usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan kesalingtergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (economic system), masyarakat (social system), dan lingkungan hidup beserta sumberdaya alamnya (ecosystem) serta program pemerintah daerah pendukung penguatan system industri. Setiap sistem ini memiliki tujuannya masing-masing. Secara umum, tujuan dari pengembangan sentra-sentra industri ini yaitu sebagai berikut:

1. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung;
2. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat;
4. Mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas antar wilayah;
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan konservasi sumberdaya alam demi kesinambungan pembangunan daerah.
6. Mendorong pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan.

Pengembangan sentra-sentra industri dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan arah kebijakan ekonomi, yaitu:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah.
3. Memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, agar mampu bekerjasama secara efektif, efisien dan berdaya saing global.
4. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan para pelakunya sesuai dengan semangat otonomi daerah.
5. Mempercepat pembangunan industri dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah dengan kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak.
6. Memaksimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan di daerah.

Selain tujuan-tujuan tersebut diatas, dari segi kepentingan daerah, pengembangan sentra industri dapat diarahkan untuk mencapai hal berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.
2. Meningkatkan mutu, produktivitas dan daya saing.
3. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah demi mencapai kemajuan dan kemandirian daerah.

Kriteria sentra-sentra industri yang berhasil antara lain adalah:

1. Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan daerah;
2. Mempunyai sektor ekonomi unggulan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi sektor lain dalam sentra itu sendiri maupun di sentra industry sekitarnya;
3. Memiliki keterkaitan kedepan (daerah memiliki pemasaran produk-produk yang dihasilkan) maupun ke belakang (mendapat suplai kebutuhan komponen produksinya dari daerah belakang) dengan beberapa daerah pendukung.
4. Memiliki kemampuan untuk memelihara SDA sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

4.5. Pengembangan Industri di Kab. Hulu Sungai Utara

a. Bahan Baku

Untuk mendorong eksistensi dan kualitas produk pada sentra meubel kayu dan meubel rotan di Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan fasilitasi kepada IKM dengan operasionalisasi UPT Rotan dan UPT Kayu, melalui berbagai program dan kegiatan antara lain berupa : pengadaan bahan baku untuk UPT Rotan dan UPT Kayu.

b. Permodalan

Bantuan langsung permodalan dilakukan melalui :

- BPR yaitu BPR Sungai Pandan, BPR Amuntai Selatan, BPR Amuntai Tengah, dan BPR Amuntai Utara, sehingga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya yang berlokasi di di wilayah sentra-sentra industri.
- LPUK
- BUMN, melalui program kemitraan

c. Bantuan Sarana dan Prasarana

Dalam upaya menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai pusat produksi meubel (kayu, rotan, aluminium) dan aneka kerajinan, telah diberikan bantuan alat penumbuk purun untuk sentra anyaman purun dan pembangunan Pasar Muara Tapus yang berlokasi di poros jalan utama Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur – Kalimantan Tengah.

d. Pemasaran

Dalam rangka meningkatkan jangkauan wilayah pemasaran bagi produk-produk unggulan kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan melalui berbagai upaya dan kegiatan, yaitu :

- Memfasilitasi pengusaha/ investor / buyer untuk melakukan kerjasama dengan pengusaha / perajin IKM
- Mewajibkan SKPD menggunakan hasil olahan pengusaha/perajin IKM (terutama : meubel, pangan)
- Partisipasi dalam pameran, baik skala lokal, regional, maupun nasional, seperti :
 - 1) Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara

- 2) Kalimantan Selatan Expo
 - 3) Smesco
 - 4) Dekranas
 - 5) Pameran Produk Kreatif Indonesia
- e. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk IKM
- Pengembangan Sumber Daya IKM menjadi perhatian penting Bupati Hulu Sungai Utara sehingga alokasi anggaran untuk berbagai pengembangan SDM khususnya IKM semakin meningkat dari tahun ke tahun.
- Sebagai wujud komitmen peningkatan SDM industri kerajinan, maka diadakan pelatihan-pelatihan/ magang diantaranya :
- Fasilitasi pemanfaatan sumber daya bagi IKM (Pelatihan anyaman purun, pelatihan anyaman eceng gondok, pelatihan pengolahan pangan, dan pelatihan sasirangan).
 - Magang perajin anyaman purun dan eceng gondok
 - Achievement Motivation Training (AMT) UKM
 - Pelatihan Kewirausahaan

Tabel 4.20. Program Peningkatan SDM untuk IKM

No	Tahun	Program / Kegiatan	Peserta (orang)
1.	2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil dan Menengah yang kondusif <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil dan Menengah b. Perencanaa, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah c. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah 2. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen b. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa c. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah d. Fasilitasi informasi harga barang dan jasa e. Sosialisasi tentang kemetrologian 3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 	<p>-</p> <p>-</p> <p>40 orang</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

No	Tahun	Program / Kegiatan	Peserta (orang)
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri c. Pendataan Industri Kecil dan Menengah d. Fasilitasi Akses Produk Industri Kecil dan Menengah e. Magang Industri Kecil dan Menengah f. Pembinaan Kerajinan oleh DEKRANASDA 	-
		4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	320 orang
		<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah b. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan c. Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD d. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 	-
		5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-
		<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pembinaa industri rumah tangga, industri kecil dan menengah b. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 	150 orang
		6. Program peningkatan dan pengembangan ekspor	120 orang
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Promosi Perdagangan 	300 orang
		7. Program peningkatan kemampuan teknologi Industri	-
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan kemampuan teknologi industry b. Pengawasan produk dan peredaran garam c. Bantuan bahan/peralatan industri 	40 orang
		8. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	-
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk b. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK) 	-
		9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	-
		<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi b. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian c. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi 	-
2.	2015	1. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	90 Orang
		<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil dan Menengah b. Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 	-

No	Tahun	Program / Kegiatan	Peserta (orang)
		c. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	
		2. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	40 orang
		a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	
		b. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	-
		c. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	-
		d. Fasilitasi informasi harga barang dan jasa	
		e. Sosialisasi tentang kemetrologian	-
		3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
		a. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	-
		b. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	-
		c. Pendataan Industri Kecil dan Menengah	
		d. Fasilitasi Akses Produk Industri Kecil dan Menengah	380 orang
		e. Magang Industri Kecil dan Menengah	-
		f. Pembinaan Kerajinan oleh DEKRANASDA	
		4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	-
		a. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-
		b. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	
		c. Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	-
		d. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	-
		5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
		a. Penyelenggaraan pembinaa industri rumah tangga, industri kecil dan menengah	90 orang
		b. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	
		6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	120 orang
		a. Pengembangan Promosi Perdagangan	120 orang
		7. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	300 orang
		a. Pembinaan kemampuan teknologi industri	
		b. Pengawasan produk dan peredaran garam	
		c. Bantuan bahan/peralatan industri	40 orang
		8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
		a. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	-

No	Tahun	Program / Kegiatan	Peserta (orang)
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK) 	-
		<ul style="list-style-type: none"> 9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi b. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian c. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi d. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi e. Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan g. Bimtek pengawasan bagi Pengawas Koperasi h. Fasilitasi penilaian kesehatan dan fasilitasi pemeringkatan koperasi i. Penilaian kesehatan koperasi j. Pemeringkatan koperasi k. HUT Koperasi l. Penerapan standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur 10. Program Pengembangan Sentra-sentra <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 	- - - - - - - - - -
3.	2016	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil dan Menengah b. Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah c. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah d. Pendataan UMKM 2. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen b. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa c. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah d. Fasilitasi informasi harga barang dan jasa e. Sosialisasi tentang kemetrolagian 3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 	120 Org 10 orang 60 orang - - - - -

No	Tahun	Program / Kegiatan	Peserta (orang)
		b. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	-
		c. Pendataan Industri Kecil dan Menengah	-
		d. Fasilitasi Akses Produk Industri Kecil dan Menengah	-
		e. Magang Industri Kecil dan Menengah	-
		f. Pembinaan Kerajinan oleh DEKRANASDA	-
		g. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	-
		4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	-
		a. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-
		b. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	-
		c. Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	-
		d. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	-
		5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-
		a. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah	-
		b. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	150 org
		6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	-
		a. Pengembangan Promosi Perdagangan	-
		7. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	120 org
		a. Pembinaan kemampuan teknologi industri	90 orang
		b. Pengawasan produk dan peredaran garam	-
		c. Bantuan bahan/peralatan industry	300 orang
		8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	-
		a. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	100 org
		b. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (Luncuran Sisa DAK)	-
		c. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	-
		9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	-
		a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	-
		b. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	-
		c. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	-
		d. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	-

No	Tahun	Program / Kegiatan	Peserta (orang)
		e. Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	
		f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	-
		g. Bimtek pengawasan bagi Pengawas Koperasi	
		h. Fasilitasi penilaian kesehatan dan fasilitasi pemeringkatan koperasi	-
		i. Penilaian kesehatan koperasi	
		j. Pemeringkatan koperasi	-
		k. HUT Koperasi	
		l. Penerapan standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur	
		10. Program Pengembangan Sentra-sentra	-
		a. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	

4.6. Kerjasama Dengan Pihak Swasta (BUMN, BUMD & Lembaga lainnya)

a. Kerjasama (MoU) dengan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan

Kerjasama dengan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan disahkan MoU pada tahun 2013 untuk pembinaan kerajinan Ampulung (anyaman purun dan ilung), dalam pelaksanaan kerjasama dilakukan pemberian bantuan peningkatan kemampuan sumber daya manusia berupa pelatihan-pelatihan serta pemberian bantuan mesin dan peralatan sebagai penunjang kegiatan produksi IKM.

b. Kerjasama dengan SCR PT. Adaro Indonesia

Kerjasama dengan PT. Adaro Indonesia pada program SCR Adaro untuk pembinaan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diarahkan pada pengembangan Industri Kecil dan Menengah berupa bantuan mesin dan peralatan penunjang produksi.

c. Kerjasama dengan PT. Pos & Giro Amuntai

Kerjasama dengan PT. Pos & Giro Amuntai dalam hal pemasaran dan pengiriman produk kerajinan untuk menunjang pemasaran produk IKM untuk peningkatan akses pasar produk kerajinan.

d. Kerjasama dengan YL Handycraft

Kerjasama dengan YL Handycraft dalam hal pembinaan dan peningkatan wawasan para pelaku usaha industri sebagai tenaga instruktur untuk memberikan inovasi produk untuk meningkatkan diversifikasi produk sehingga varian produk

kerajinan Kabupaten Hulu Sungai Utara semakin beraneka ragam. Selain itu juga bekerjasama dalam peningkatan akses pasar produk kerajinan baik Nasional maupun ke ranah internasional.

4.7. Penegembangan Sektor Komoditi Unggulan (UKM)

Berdasarkan data tahun 2013 – 2015, potensi industri kecil dan menengah, khususnya sentra unggulan IKM di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun, ditinjau dari aspek unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan nilai produksinya.

Tabel 2.30. Perkembangan Sentra Unggulan IKM Tahun 2015

No.	Sentra Unggulan	Lokasi	Unit usaha (buah)	Tenaga Kerja (orang)
1.	Kerajinan :			
	- Anyaman Purun	Kec.(Amt.Selatan, Dn.Pggang, Haur Gadng, Sei.Tabukn, Amt.Tengh, Paminggr, Babirk)	13.332	23.472
	- Anyaman Bambu	Kec. Haur Gading	381	564
	- Anyaman Rotan / Lupu			
	- Anyaman Eceng Gondok	Kec.(Haur Gading, Amt.Utara, Sei.Pandan)	365	550
	- Anyaman Plastik			
	- Anyaman Bamban	Kec.(Amt.Selatan, Dn. Panggang, Amt.Tengah)	264	410
	- Atap/Lampit Rumbia			
	- Lampit Rotan	Kec. Amt.Utara	352	549
	- Kerajinan Ukiran	Kec. Amt.Utara	135	241
	- Pembuatan Jala	Kec. Amt. Utara	258	347
	- Kembang Dalam Botol	Kec.(Amt.Selatan, Amt. Tengah)	170	333
		Kec.(Amt.Selatan, Amt. Tengah)	217	281
	Kec.(Sei.Pandan,Amt.Selatan ,Babirik,Dn.Pngngg)	384	810	
	Kec.Haur Gading	1	3	
2.	Kimia Bahan Bangunan :			
	- Meubel Rotan			
	- Meubel Bambu	Kec. Haur Gading	31	91
	- Meubel Kayu	Kec. Haur Gading	38	57
		Kec.(Amt.Selatan, Amt. Tengah)	501	1.228
- Pembuatan Perahu				
- Industri Daur Ulang Karet	Kec.(Sei.Pandan,Babirik,Dn. Pnggang,Amt.Tengh)	46	100	

No.	Sentra Unggulan	Lokasi	Unit usaha (buah)	Tenaga Kerja (orang)
		Kec.Amt.Tengah	2	10
3.	Logam : - Meubel Aluminium - Bengkel Motor - Las/bengkel/ alsintan	Kec.(Amt.Selatan, Amt. Tengah,Sei.Pandan) Kec.(Amt.Seltn,Amt.Tngah, Amt.Utra,Sei.Pandan) Kec.(Amt.Selatan, Amt. Tengah,Dn.Panggang)	1.054 377 291	2.146 569 349
4.	Pangan : - Kerupuk ikan/itik - Kue Kering - Telur Asin - Dendeng itik - Isi ulang air mineral - Minuman segar	Kec. Amt. Tengah Kec. (Sei.Pandan,Banjang) Kec.(Amt.Selatan, Amt. Tengah,Sei.Pandan) Kec.Amt. Tengah Kec.(Amt.Seltn,Amt.Tngah, Amt.Utra,Sei.Pandan) Kec.(Babirik,Dn.Panggang,S ei.Tabukan,Sei.Pandan)	178 207 96 12 53 9	218 345 198 30 101 39
5.	Sandang : - Kopiah haji/peci - Konfeksi - Sulam bordir/tangan	Kec.Amt. Tengah Kec. Sei.Pandan Kec.(Sei.Tabukan, Sei. Pandan)	15 156 379	36 315 710
Jumlah			19.304	34.102

Sumber : Data Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015

4.8. Potensi hambatan dan masalah dalam pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Utara

Potensi hambatan dan masalah dalam pelaksanaan industri Kabupaten Hulu Sungai Utara yang didasarkan pada pembahasan secara umum, serta berdasarkan hasil FGD dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat, dapat dikemukakan beberapa permasalahan, yakni permodalan, produksi, dan pengelolaan usaha, dan pemasaran yang diuraikan sebagai berikut:

1). Permodalan

Permodalan yang dibutuhkan tergantung kebutuhan biaya produksi dari masing-masing jenis usaha industri dan kerajinan yang dikelola, umumnya mereka memiliki modal hanya mampu untuk beberapa kali produksi dalam kurun waktu

tertentu. Dengan demikian kondisi membuat kurangnya persediaan baik bahan baku maupun barang jadi untuk memenuhi permintaan yang meningkat.

2). Produksi

Sistem dan teknologi proses produksi yang diterapkan para perajin umumnya masih tradisional dan manual dengan peralatan sederhana sehingga jumlah, kualitas dan desain produk yang dihasilkan masih terbatas khususnya pada industri kerajinan dimana sistem dan proses produksi yang ada cenderung masih mereka pertahankan karena telah menjadi kebiasaan, disamping tidak menguasai teknologi proses produksi yang maju dan berkembang serta tidak mampu menyediakan mesin dan peralatan produksi yang lebih baik karena terkendala aspek biaya.

3). Pengelolaan Usaha

Pengelolaan usaha dilakukan dengan seadanya belum mampu menguasai dan menerapkan manajemen meskipun secara sederhana, hal ini terkait dengan tingkat SDM mereka, begitu pula semangat kewirausahaan, inovasi dan kreativitas yang dimiliki masih terbatas sehingga masih perlu pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu dari berbagai pihak untuk meningkatkan pengembangan usahanya.

Selain itu secara umum industri di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum terpenuhi hak paten industri sehingga rawan untuk dilakukan plagiat pada daerah lain bahkan negara lain. Kelemahan dalam Hak Paten dipengaruhi oleh kebijakan nasional dimana saat ini secara nasional baru terbentuk 50 sentral HKI se Indonesia dan termasuk Sentral HKI yang terbentuk di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Beberapa faktor yang ikut berpengaruh pada rendahnya patent industri di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- 1) Kesadaran masyarakat (motivasi)
- 2) Sentral HKI baru terbentuk
- 3) Birokrasi pematenan
- 4) Biaya patent
- 5) Pemahaman akan pentingnya patent

Dengan demikian diperlukan kerjasama dalam bidang Hak Paten pada seluruh industri di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat yang baru terbentuk pada tahun

2013 atau melalui Kementerian Hukum dan HAM di daerah dalam rangka menyelamatkan aset industri daerah.

4). Pemasaran

Pemasaran produk sebagian besar masih terbatas pada pasar lokal dan antar pulau antara lain propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Bali dan sebagian kecil kepulauan Jawa, sedangkan untuk pasar ekspor hanya dalam skala kecil melalui pengusaha di Banjarmasin dan Bali disamping sebagai barang bawaan. Untuk meningkatkan pemasaran tersebut masih terdapat kendala yaitu lemahnya daya saing terutama kualitas, desain dan harga.

BAB V

PENUTUP

Visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Utara dikaitkan dengan visi dan misi pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional ke dalam program dan rencana aksi pembangunan industri Kalimantan Selatan selama periode 2016-2035. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah: ***“Industri yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Sebagai Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumber Daya Lokal”***

Fokus pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

- a. Industry Hulu Agro, yaitu industry produk Kerajinan, Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Pengolahan Hasil Perkebunan, Pengolahan Hasil Perikanan, Pengolahan Peternakan, Furniture
- b. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, yaitu Kopyah haji/peci, Konfeksi, Sulam bordir/tangan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan sentra industri dan pemberdayaan IKM yang menunjang pembangunan industri.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan penjabaran lebih detail dari RPJP Kabupaten Hulu Sungai Utara periode tahun 2005-2025 dan RPJMD khususnya terkait dengan pembangunan Ekonomi industri. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016-2035 ini diharapkan menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Utara.